



# RENCANA KERJA (RENJA) 2026

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA



**#** bangga  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) 2026 ini dapat disusun tepat waktu. Dokumen ini merupakan landasan strategis dan operasional dalam upaya mewujudkan tujuan serta sasaran program sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Rancangan Akhir Renja ini disusun dengan mempertimbangkan analisis kebutuhan, dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Melalui pendekatan partisipatif, rancangan ini diharapkan mampu mengakomodasi berbagai usulan dari para pemangku kepentingan sehingga menjadi dokumen yang relevan dan aplikatif dalam mendukung keberlanjutan pembangunan serta pelayanan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) dapat disusun atas partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Besar harapan kami agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan dan dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Daerah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada semua *stakeholder*.

Purbalingga, 16 Juli 2025  
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA  
  
ATO SUSANTO.AP., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740706 199311 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH .....	1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah .....	1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	33
2.6 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja .....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	35
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah .....	37
3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah .....	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	43
BAB V PENUTUP .....	60
Lampiran 1 Risk Register Inspektorat Daerah.....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s.d 2023 .....	17
Tabel 2. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	24
Tabel 2. 3 Rekapitulasi Perkembangan Tindak Lanjut Tahun 2023 .....	27
Tabel 2. 4 Hasil Penilaian SAKIP Inspektorat.....	29
Tabel 2. 5 Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat .....	35
Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah .....	18
Tabel 2. 9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	43
Tabel 3 1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat.....	38
Tabel 3 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2025.....	40

**No table of figures entries found.**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Realisasi Anggaran Per Kegiatan .....	7
---	---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan. Penyusunan Renja ini merupakan bagian dari siklus sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 mendukung Visi Misi yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yaitu **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”** dengan misi sebagai berikut :

1. Bangkitkan Ekonomi Rakyat : Pemberdayaan Ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan Modernisasi sektor Pertanian
2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur : Peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi
3. Reformasi Pelayanan Publik : Digitalisasi Pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi
4. Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk membangun SDM yang Unggul

Mendasari pada visi dan misi tersebut, Inspektorat Daerah merupakan instansi yang memiliki peran strategis dan penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Inspektorat berperan dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*). Sehingga Inspektorat sangat erat kaitannya dengan pencapaian **misi ketiga** yaitu pada reformasi pelayanan publik dengan Digitalisasi Pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Rencana Kerja (Renja) ini berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri maupun Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Renja disusun didasarkan atas

prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB secara *Online*;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
19. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2021-2026

20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah;
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rancangan Akhir (Rankhir) Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Renja Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Penyusunan Rankhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan. Dokumen Rencana Kerja disusun sebagai upaya mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah. Dokumen Rencana Kerja digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Serta sebagai acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan, serta bahan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2024**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5 Strategi untuk Peningkatan Kinerja di masa datang

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

3.2 Program dan Kegiatan Inspektorat

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

BAB V. PENUTUP

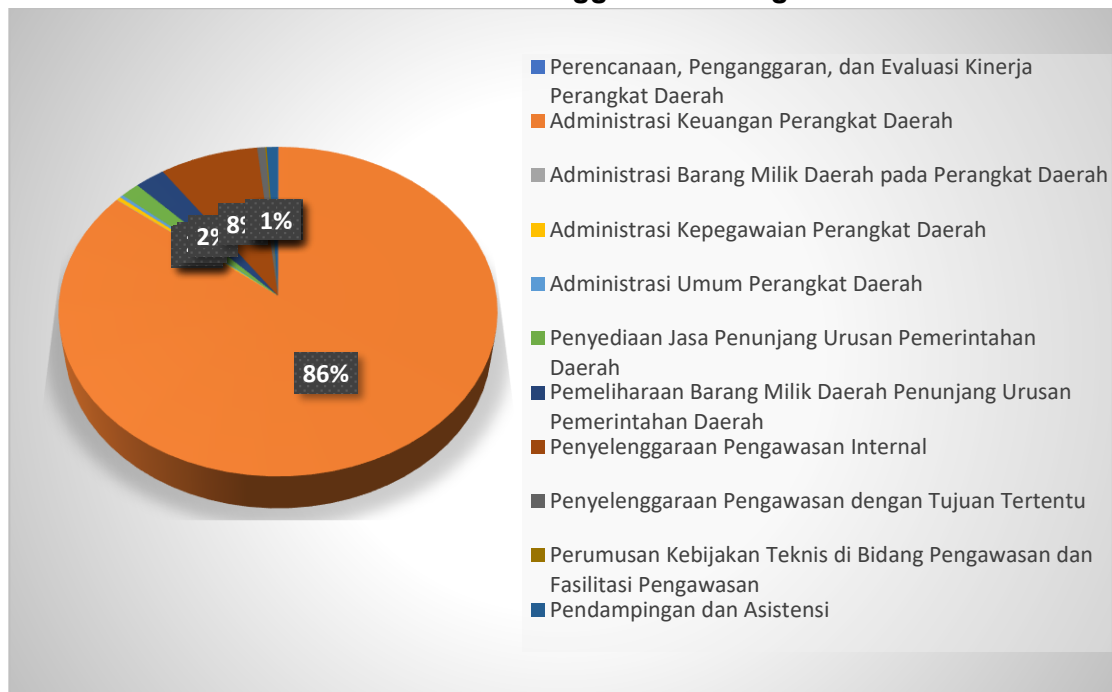
**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah**

Inspektorat Daerah telah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) dengan seksama, bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam proses evaluasi ini, Inspektorat Daerah mengidentifikasi terkait realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 yang mencakup indikator kinerja, anggaran yang telah digunakan serta kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Renja.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024, sesuai dengan anggaran perubahan memiliki 3 Program, 12 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Jika dilihat dari komposisi, secara garis besar realisasi belanja Inspektorat Daerah pada Tahun 2024 dapat dilihat sesuai dengan grafik berikut ini :

**Gambar 2.1**  
**Grafik Realisasi Anggaran Per Kegiatan**



Pada tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan 2 program strategis dan 1 program penunjang dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp 8.764.132.000, dan terealisasi sebesar Rp 8.089.023.293 atau 92,30%. Dengan presentase penggunaan

anggaran terbanyak pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Untuk realisasi anggaran serta pencapaian target dan kinerja program dan kegiatan secara umum dapat kami uraikan sebagai berikut:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar 91,48% yaitu Rp 7.243.929.068 dari Rp 7.918.721.000, dengan pencapaian target kinerja dan keuangan pada kegiatan sebagai berikut:

1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan 100% dari rencana target triwulanan, dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 98,97% dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 2024, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.500.000 dan realisasi sebesar Rp 1.488.500 (99,23%)

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah, LKPJ, dokumen capaian triwulanan serta evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Alokasi anggaran sebesar Rp 1.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.480.500 (98,70%).

2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dapat dilaksanakan 100% dari target, dengan pencapaian target kinerja keuangan sebesar 91,23%. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi pelaksanaan kegiatan yang dimaksud adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu dengan jumlah pegawai 48 orang setelah dikurangi 2 personil pensiun, 1 personil mutasi dan penambahan 1 CPNS. Alokasi anggaran sebesar Rp7.355.503.000 terealisasi sebesar Rp 6.697.145.414 (91,05%)

- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah terlaksananya perjalanan dinas luar daerah. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini setelah perubahan sebesar Rp 115.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 114.999.524 (100%).
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  
Realisasi sub kegiatan ini adalah terbayarnya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan belanja kertas cover dengan lokasi anggaran sebesar Rp 35.440.000,00 terealisasi sebesar Rp 35.430.000 (99,97%).
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.  
Realisasi pada sub kegiatan ini honorarium pejabat pengadaan barang/jasa dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.000.000,00 dengan realisasi Rp 3.999.500
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dapat dilaksanakan 100% dari target rencana triwulanan, dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 98,45%. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp30.000.000 terealisasi sebesar Rp29.855.000,00 (99,52%) yang diantaranya:
- Pelatihan teknis SAKIP Tematik Pola Biaya Instansi Pengirim (BIP) di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 3 s.d 5 Maret 2024 atas nama Efi Ristiyanti, S.T.
  - Pelatihan Penjenjangan PPUPD Jenjang Madya Angkatan I dan II secara luring (offline) di Tamarin Hotel Jakarta pd 1-2 April 2024 atas nama Budiharto, S.Sos
  - Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I secara klasikal di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Jakarta tanggal 14 Maret s.d 3 April 2024 atas nama Agustin Diah Purnamawati, S.E
  - Penyelenggaraan Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP pd tgl 25 April s.d 6 Mei 2024 (E-Learning), 14 s.d 29 Mei 2024 (Tatap Muka) bertempat di PJJ

(Pembelajaran Jarak Jauh) atas nama Anita Fatmairanti,S.E., Rifqi Triatmojo,S.E, dan Vita Sidiyanti,S.E.

- Diklat Reviu Rencana Kerja Anggaran Berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Angkatan I Tahun 2024 di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta Pusat pd tgl 9 s.d 15 Juni 2024 atas nama Fita Fatmawati,S.Si,.M.Si
- Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemahaman dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Purwokerto pada tanggal 26 September 2024 atas nama Mardawati, S.Sos, M.Si

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dapat dilaksanakan 100 % dari target rencana triwulanan dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 100%. Sub pada kegiatan ini yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pelaksanaan pada sub kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya perlengkapan listrik antara lain : kabel listrik, lampu LED, dll. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp800.000,00 terealisasi Rp.800.000,00 (100%)

b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya bahan logistik kantor antara lain : isi tabung gas elpiji, belanja ATK, karangan bunga, dll. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi Rp 9.877.725 (98,88%)

c. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Realisasi pada pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu tersedianya jamuan kunjungan tamu terutama untuk para auditi yang diundang untuk melakukan konfirmasi dan komunikasi hasil audit. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp8.000.000,00 dengan realisasi Rp7.997.250,000 (99,97%)

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya makanan dan minuman rapat. Pelaksanaan

kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp 4.500.000 terealisasi Rp4.500.000 (100%).

e. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Realisasi pada sub kegiatan ini yaitu honorarium Pengelola SIM Aset, SIMDA, dan SIPD dengan alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.500.000, dan realisasi 2.479.000 (100%).

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pencapaian target kinerja dapat dilaksanakan 100 % dari target, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah tersedianya jasa paket/pengiriman. Alokasi anggaran sebesar Rp500.000 terealisasi sebesar Rp500.000 (100%). Penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan dan pada saat ini dengan perkembangan era digitalisasi Pemkab Purbalingga telah memulai penggunaan aplikasi **Srikandi**.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah tersedianya daya listrik, air PDAM, jasa telekomunikasi dan internet. Alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp108.486.000,00 terealisasi sebesar Rp 93.846.556 (86,51%). Terdapat sisa anggaran penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp14.639.444,00 karena perhitungan anggaran kebutuhan listrik setiap bulan mengalami fluktuatif.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan ini adalah honor 1 orang PTT dengan SK Bupati. Sub kegiatan ini dari anggaran sebesar Rp25.992.000,00 terealisasi Rp24.601.845 (94,65%).

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pencapaian target kinerja dapat dilaksanakan 100%, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,96%.Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan kantor berupa pemeliharaan kendaraan dinas, penggantian suku cadang dan terbayarnya pajak dan perizinan kendaraan dinas. Permasalahan yang dialami pada sub kegiatan ini adalah terbatasnya jumlah anggaran tahun 2024 apabila dihadapkan dengan kebutuhan riil yang ada di Inspektorat terutama pada rekening Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, karena jumlah kendaraan Dinas roda empat tergolong banyak, serta mobilitas Inspektorat cukup tinggi sementara banyak kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai, sehingga dengan kondisi yang ada tersebut, diadakan efisiensi terhadap pos-pos pengeluaran pada sub kegiatan ini. Pada tahun 2024 dari anggaran sebesar Rp170.000.000 terealisasi Rp 169.918.254 (99,95%).

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu terpeliharanya peralatan kantor diantaranya komputer, laptop, printer, AC dan peralatan mesin lainnya. Sub kegiatan ini dari anggaran sebesar Rp10.000.000 terealisasi Rp10.000.000 (100%).

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Realisasi dari kegiatan ini adalah pemeliharaan bangunan, instalasi air bersih dan jaringan listrik dengan anggaran sebesar Rp35.000.000 dan terealisasi 100%

## 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pada program ini realisasi anggaran sebesar 78,19% yaitu Rp 698.743.755 dari Rp 698.911.000. Capaian kinerja tahun 2024 dengan indikator **persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik** sebesar 73,09% serta

**persentase capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan** sebesar 133,33%. Adapun pencapaian target kinerja dan keuangan pada masing-masing kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan indikator jumlah objek pengawasan yang diperiksa dengan target 120 obyek pemeriksaan (Obrik) dengan realisasi 160 obrik, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,97%. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu jumlah laporan pengawasan kinerja pemerintah daerah sebanyak 86 laporan yang meliputi laporan kegiatan pengawasan seperti Audit Kinerja Pelayanan Publik pada OPD Pelayanan, Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP, Evaluasi PPRG, dan beberapa pengawasan lainnya. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp85.962.000,00 dengan realisasi Rp 85.954.400 (99%).

2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu jumlah laporan Pengawasan Keuangan sebanyak 40 laporan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan seperti Monitoring dan Evaluasi Aset, Persediaan dan Kas Opname pada Perangkat Daerah, Pemeriksaan Operasional Pengelolaan Keuangan pada OPD, Pemeriksaan Operasional Pengelolaan Keuangan pada Puskesmas, Reviu Standar Harga Satuan (SHS), Reviu Analisa Standar Biaya (ASB), Reviu Optimalisasi Pajak Daerah, Reviu RKA, Reviu Bantuan Keuangan Pemerintah. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp162.637.000,00 dan terealisasi Rp 162.636.250 (100%).

3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud terlaksananya Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Reviu DAK fisik dan nonfisik, Reviu DAU, Reviu RKPD, Reviu KUA PPAS, Reviu Rancangan RPJMD serta Evaluasi AKIP pada OPD dan Kecamatan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp98.750.000,00 realisasi Rp 98.729.000 (99,98%).

4) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu terlaksananya dan tersedianya laporan LKPD sebanyak 1 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp8.000.000,00 terealisasi 100%

5) Sub Kegiatan Pengawasan Desa

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu laporan hasil pengawasan desa sebanyak 27 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini seperti Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pemeriksaan Operasional Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Desa, Pendampingan Desa Antikorupsi, Monitoring atas Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Sarpras, Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Pemerintah Kabupaten dan Program Ketahanan Pangan serta pengawasan desa lainnya. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp107.562.000,00 dengan realisasi Rp 107.561.900,00 (100%).

6) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu : a) Tersedianya bahan materi pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi dan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah masing-masing 1 laporan; b) Tersedianya laporan ikhtisar hasil pemeriksaan sebanyak 1 laporan; c) Tersedianya laporan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah sebanyak 4 laporan; d) Terlaksananya monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan desk dengan OPD terkait penyelesaian kerugian negara/daerah. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp236.000.000,00 terealisasi Rp 235.862.205 (99,94%).

- b. Pencapaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan indikator kinerja **persentase pengaduan yang ditindaklanjuti** dapat dilaksanakan 100%, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah

Realisasi sub kegiatan yang ini seperti Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.000.000,00 realisasi sebesar Rp 38.997.500 (99%).

b. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Realisasi sub kegiatan yang dimaksud seperti Probitiy Audit dan Reviu HPS, kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dana hibah pada PKBM, Audit Investigasi, Pengawasan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dana bantuan sosial, Reviu Pemberian Dana Hibah fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual dan kegiatan pengawasan lainnya. Alokasi anggaran sebesar Rp17.500.000,00 realisasi sebesar Rp17.440.000,00 (99%).

**3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi**

Pencapaian target kinerja program dengan 2 indikator yaitu **Nilai Indeks MRI** dengan realisasi 2,878. Sedangkan untuk **nilai MCP pada area APIP** tercapai realisasi sebesar 92,34 dari target 93,00.

Pada program ini realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp 89.912.970 dari total anggaran Rp 90.000.000 dengan pencapaian target kinerja dan keuangan pada kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Target Kinerja pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yaitu tersusunnya Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.997.403 dari total anggaran Rp 10.000.000
- 2) Pencapaian Target Kinerja pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan indikator kinerja jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP Korsupgah dan jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM dapat dilaksanakan 100% dari rencana target, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini seperti pendampingan penilaian SPIP dan Sosialisasi penyusunan RTP dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000,00 realisasi sebesar Rp 14.982.317 (99%).

b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan sub kegiatan ini seperti terselenggaranya bimbingan teknis reformasi birokrasi dan rapat koordinasi lainnya. Alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000,00 realisasi sebesar Rp 14.954.750 (99%).

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000 realisasi sebesar Rp 19.993.000 (99%).

d. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas

Alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000 realisasi sebesar Rp 29.985.500 (99%).

Untuk lebih jelasnya secara ringkas capaian pelaksanaan renja akan disajikan dalam rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 yang ditunjukkan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan**  
**Pencapaian Renstra Inspektorat tahun 2024**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga**

Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2016-2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program / Kegiatan Renstra PD Sampai dengan tahun 2024	
					Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6		URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAH								
6	01	INSPEKTORAT DAERAH								
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>								
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2016-2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program / Kegiatan Renstra PD Sampai dengan tahun 2024	
					Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase dokumen laporan disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah sesuai Ketentuan	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Jam Latihan Pegawai	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum penunjang operasional	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Kantor yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2016-2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program / Kegiatan Renstra PD Sampai dengan tahun 2024				
					Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
6	01	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik</b>	<b>64%</b>	<b>72,47 %</b>	<b>73%</b>	<b>73,09%</b>	<b>100%</b>	<b>73%</b>	<b>71,86%</b>	114%	
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa	110 obrik	150 obrik	120 Obrik	160Obrik	133%	120 obrik	120 Obrik	109%
					Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	01	03		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	2,25	2,34	2,50	2,878	115%	2,5	-	-
					Nilai MCP Korsupgah (Area APIP)	78	93	93	92,34	99,29%	93	77,40%	131%
6	01	03	2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawas yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2016-2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program / Kegiatan Renstra PD Sampai dengan tahun 2024					
					Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Jumlah Laporan kegiatan pendampingan MCP Korsupgah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50%	4 Laporan	10 Laporan	100%	
					Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	2 Laporan	5 Laporan	100%	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

### a) Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Kedudukan Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tugas yaitu membantu Bupati Purbalingga dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam upaya mendukung Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dengan peningkatan kapasitas dan intensitas Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga fokus kepada kinerja pelayanan antara lain:

1. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif) dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan;
2. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Membuka Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah sehubungan dengan peran Inspektorat Daerah menjadi *Quality assurance*
4. Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya maksimal sudah tidak mencapai hasil;
5. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga disusun berdasarkan prioritas dan risiko, meliputi:

1. Pemeriksaan Operasional Keuangan Perangkat Daerah  
Meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menggunakan sumber daya yang dibiayai oleh APBD maupun Sumber Keuangan Lain dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama periode tertentu. Tujuan Pemeriksaan Operasional Keuangan adalah memberikan

keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Fokus dan sasaran Pemeriksaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu mendasari Register Resiko yang tertuang dalam Rencana Tindak Pengendalain (RTP) Strategis Pemerintah Daerah, RTP Strategis Perangkat Daerah dan RTP Operasional OPD
  - b. Menilai aspek 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis) yaitu APIP berperan dalam memberi nilai tambah terhadap efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan program/kegiatan dengan cara yang lebih sistematis
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, yaitu pemeriksaan sesuai dengan ruang lingkup, tujuan serta sasaran yang akan dilakukan pemeriksaan meliputi;
  - 1) Probit Audit;
  - 2) Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - 3) Pemeriksaan Investigasi;
  - 4) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah;
  - 5) Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
  - 6) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya
4. Pengawasan Mandatori  
Merupakan kegiatan pengawasan yang diberikan tanggung jawab oleh Instansi Pusat / Instansi Vertikal atau Aparat Pengawas Lain yang bersifat wajib harus dilaksanakan, meliputi:
  - a. Reviu Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah (Reviu RPJMD, Reviu RKPD, Reviu RKA)
  - b. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - c. Reviu Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. Reviu Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
  - e. Reviu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK);
  - f. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
  - g. Reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa pemerintah dan penyaluran dana desa;
  - h. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
  - i. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- j. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korpsugah);
  - k. Koordinasi Penilaian Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korpsugah).
5. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat/permintaan lembaga/instansi terkait maupun Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan investigasi maupun Bantuan Perhitungan Kerugian Negara, dengan fokus:
- a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
  - b. Penyalahgunaan wewenang;
  - c. Hambatan dalam pelayanan publik;
  - d. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
  - e. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat.
6. Pengawasan Prioritas Nasional
- Pengawasan prioritas nasional meliputi:
- a. Pemantauan, Pemeriksaan dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
  - b. Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Pengawasan Reformasi Birokrasi dan *Good Governance*, dengan fokus:
- a. Fasilitasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli);
  - b. Survei Penilaian Integritas (SPI);
  - c. Evaluasi atas Reformasi Birokrasi;
  - d. Penanganan Gratifikasi;
  - e. Penanganan Pengaduan *Wistle Blowing System (WBS)*;
  - f. Monitoring LHKPN
  - g. Penanganan Benturan Kepentingan;
  - h. Pembangunan Zona Integritas untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)

- i. Pendampingan persiapan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
8. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
    - a. *Consulting* Penatausahaan Keuangan BOS
    - b. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
    - c. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
    - d. Sosialisasi Antikorupsi pada masyarakat bersama dengan PAKSI

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Kabupate Purbalingga terdapat dalam tabel 2.7 berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**

Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(2)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)		(12)	
<b>Indikator Tujuan 1</b>								
Nilai Maturitas SPIP	3,0600	3,0500	3,0000	3,000	2,862	3,067	3,080	
<b>Indikator Sasaran 1</b>								
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	86,10%	86,20%	86,25%	86,30%	93,44%	93,73	93,80%	
Nilai Kapabilitas APIP	n/a	n/a	n/a	n/a	3,04	3,00	3,040	
<b>Indikator Program</b>								
Persentase nilai potensial kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik	62%	64%	66%	68%	72,47%	73,09%	73,20%	
Persentase Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	
<b>Indikator Kegiatan</b>								
Jumlah Objek yang diperiksa	100	110	120	130	150	160	130	
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>Indikator Sasaran 2</b>								
Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	n/a	n/a	n/a	n/a	2,685	2,910	2,950	
Persentase tertanganinya Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	
<b>Indikator Program</b>								
Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	1,75	2,00	2,25	2,5	2,322	2,878	2,900	
Nilai MCP Korsupgah (Area APIP)	-	96	96,25	96,50	95,30	92,34	93,10	
Persentase Pengaduan Berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang Terbukti	n/a	n/a	n/a	n/a	-	100%	100%	
<b>Indikator Kegiatan</b>								

Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(2)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)		(12)	
Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP Korsupgah	4	4	4	4	4	2	4	
Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	2	2	2	2	2	1	2	
<b>Indikator Tujuan 2</b>								
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a		-		
<b>Indikator Sasaran 3</b>								
Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	75	77	77,50	78	76,31	76,96	77,30	
<b>Indikator Program</b>								
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	
Persentas pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase pengadaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100	
<b>Indikator Kegiatan</b>						100		
Persentase dokumen perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase dokumen laporan disusun	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	12	
Presentase terpenuhinya Jam Latihan Pegawai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	
Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		12	
Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		100	
Persentase Kebutuhan Jasa Kantor yang Tersedia	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		12	
Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	12	

**b) Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sampai dengan Tahun 2024**

Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan perubahan pada Indikator Kinerja Utama, dari sebelumnya hanya satu indikator kinerja tujuan dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran menjadi 2 (satu) indikator kinerja tujuan dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Hal ini dikarenakan seiring dengan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Daerah senantiasa dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan mampu mencerminkan capaian strategis secara tepat namun dalam evaluasi yang dilakukan ditemukan bahwa untuk indikator kinerja Nilai MCP (*Monitoring Center of Prevention*) memiliki sejumlah kendala yang menyebabkan penurunan relevansi, terutama karena adanya kriteria yang terus berubah. Oleh karena itu Inspektorat Daerah mengambil langkah strategis untuk melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja utama. Proses perubahan ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada prinsip *SMART* (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*), serta melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan keselarasan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

Secara rinci analisis pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2. 3  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Tahun 2024**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,000	3,067	102,23%
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	Persen	93,50%	93,73%	100,25%
		Nilai Kapabilitas APIP	Level/ Nilai	3,06	3	98,04%
	Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi	Nilai IEPK	Nilai	2,700	2,910	107,78%
		Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	Persen	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat Daerah		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	49	53	108,16%

	Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	77,10	76,96	99,87%
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2024						102,33%

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut :

## 1. Capaian Indikator Tujuan

### 1) Nilai Maturitas SPIP

Capaian Nilai SPIP Tahun 2024 mendasari Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor PE.09.03/LHP-673/PW11/3.2/2024 tanggal 24 Desember 2024 dengan nilai **3,067**. Capaian tersebut lebih tinggi 0,067 poin dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja yaitu 3,000 dengan presentase capaian kinerja sebesar **102,23% (Sangat Tinggi)** serta meningkat 0,405 dibandingkan dengan Nilai SPIP tahun 2023. Dengan capaian nilai SPIP 3,067 maka Karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga terpenuhi pada **level 3 (terdefinisi)**, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif.

### 2) Nilai Kematangan Perangkat Daerah

Pada tahun 2024, Inspektorat Daerah melakukan perubahan penambahan tujuan strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan indikator yang ditetapkan yaitu Nilai Kematangan Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan dengan pertimbangan kesesuaian sasaran indikator kinerja dengan tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah. Kematangan perangkat daerah mencerminkan kemampuan suatu organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya secara profesional, efektif, dan akuntabel. Tingkat kematangan ini tidak hanya tercermin dalam kelengkapan struktur organisasi, tetapi juga melalui implementasi sistem kerja yang adaptif, inovatif, dan berbasis hasil.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah bahwa Penilaian perangkat daerah dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah. Terdapat 11 Variabel dan indikator penilaian organisasi perangkat daerah yang harus dipenuhi. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8/24203/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, bahwa capaian Nilai Kematangan Lembaga Inspektorat Daerah Tahun 2024 Sebesar **53** dengan capaian Kinerja 108,16% (**Sangat tinggi**) dari target 49 dan **mengalami peningkatan** sebesar 4 *point* dari tahun 2023. Hasil ini menunjukkan bahwa Nilai Kematangan pada Inspektorat Daerah **sangat tinggi**.

## **2. Target Indikator Kinerja Sasaran**

### **1) Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah**

#### **a. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai ditindaklanjuti**

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti diukur dengan persentase capaian status tindak lanjut rekomendasi temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yaitu dari total 15.564 rekomendasi sebanyak 14.588 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dengan persentase nilai capaian sebesar 93,73%, dengan rincian diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Persentase Tindak Lanjut

No	INSTANSI	TEMUAN	REKOMENDASI	STATUS REKOMENDASI			
				SELESAI	DALAM PROSES	BELUM SELESAI	%
1	INSPEKTORAT DAERAH PURBALINGGA	9.266	14.241	13.319	698	233	93,53%
2	INSPEKTORAT PROVINSI	269	378	378	0	0	100,00%
3	BPKP PERWAKILAN PROVINSI	40	60	54	6	0	90,00%
4	BPK-RI	387	885	837	48	0	94,58%
	<b>TOTAL</b>	<b>9.962</b>	<b>15.564</b>	<b>14.588</b>	<b>743</b>	<b>233</b>	<b>93,73%</b>

Berdasarkan tabel diatas masih terdapat 976 rekomendasi masih dalam proses maupun belum selesai ditindaklanjuti yang terdiri 394 rekomendasi yang bersifat keuangan dan 582 rekomendasi bersifat administrasi. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pemeriksaan dari tahun 2007 sampai dengan 2024.

#### b. Nilai Kapabilitas APIP

Semakin kompleksnya peran dan fungsi APIP dalam berjalannya Pemerintahan menuntut kinerja dan kompetensi APIP yang semakin baik. Kinerja dan Kompetensi APIP dapat diukur dari Level/Nilai Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Penilaian Kapabilitas APIP dilakukan menggunakan aplikasi <https://apip.bpkp.go.id/newpkapip>. APIP terlebih dahulu melakukan Penilaian Mandiri sebelum dilakukan Evaluasi jenjang 1 oleh Tim Evaluator BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi atas Penilaian Mandiri APIP dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung/ *evidence* untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan Kaabilitas APIP. Dari hasil evaluasi tersebut, Nilai Kapabilitas APIP yang merupakan Indikator Kinerja Sasaran pada Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan Perjanjian kinerja antara Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga pada Tahun 2024 masih berada pada Level 3 dengan nilai 3,00 **mengalami penurunan** dari tahun sebelumnya yaitu 3,04. Meskipun masih berada pada Level 3, Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga belum mencapai

target yang ditetapkan yaitu 3,06. Sebagaimana Tercantum Pada Laporan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Purbalingga PE.09.03/LHP-335/PW11/6/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tidak tercapainya target nilai Kapabilitas APIP disebabkan karena :

1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat belum memenuhi perhitungan kebutuhan SDM sebagaimana disebutkan Surat Kepala BPKP Nomor S-1905/K/JF/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, yaitu total kebutuhan JFA sebanyak 52 orang auditor
2. Peta kompetensi belum memuat analisis gap yang menyajikan latar belakang pendidikan, riwayat jabatan, pangkat dan kompetensi yang dimiliki, kriteria kompetensi, dan kompetensi yang masih dibutuhkan untuk seluruh pegawai.
3. Porsi anggaran pengawasan APIP belum sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
4. Belum ada regulasi/kebijakan terkait mekanisme pelaporan dan komunikasi yang diperlukan ketika dijumpai tindakan yang berpotensi ataupun berindikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Pasal 33, 33A, dan 33B
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga perlu meningkatkan Kualitas Jasa Konsultasi, Audit Ketaatan, dan GRC

Dalam Upaya terus meningkatkan kapabilitas APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Terkait dengan pengawasan kinerja APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selalu berkoordinasi dengan Pimpinan

(*Management Oversight*) guna meminta masukan terkait kinerja APIP.

2. Terkait dengan anggaran, Inspektorat Daerah telah Menyusun nota dinas kepada Bupati Purbalingga agar dapat menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.113013/SJ, dan Nomor HK.01.00/SE.3/K.D312024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dengan Total belanja daerah, diatas Rp 2.000.000.000.000 untuk mengalokasikan anggaran pengawasan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
3. Secara bertahap, APIP Inspektorat Daerah senantiasa berusaha mengikuti berbagai webinar melalui zoom meeting, seminar online, dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sebagai wujud komitmen dalam rangka melaksanakan pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk memenuhi peran professional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas *assurance* dan *consulting*.
4. APIP telah Mendorong manajemen Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan implementasi Perbup Manajemen Risiko yang telah ditetapkan
5. Tim Kapabilitas APIP melakukan *Self Assesment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara Kapabilitas APIP Level 3.

## **2) Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan Pengaduan yang Berindikasi Korupsi**

### **a. Nilai IEPK (Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi)**

Tahun 2024 ini Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga melakukan perubahan terhadap indikator sasaran sebelumnya yaitu Nilai MCP (*Monitoring Center of Prevention*) menjadi Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya Nilai MCP (*Monitoring Center of Prevention*) memiliki sejumlah kendala

yang menyebabkan penurunan relevansi, terutama karena adanya kriteria yang sulit diikuti. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dipandang lebih mampu menggambarkan sasaran dibandingkan Nilai MCP. Menurut Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Indeks ini mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memberikan gambaran tentang transparansi, akuntabilitas, dan integritas tata kelola pemerintahan. IEPK tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan antikorupsi yang strategis dan berkelanjutan. Dengan adanya indeks ini, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap pencapaian tata kelola yang baik.

IEPK yang merupakan salah satu unsur penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terintegrasi pada pemerintah daerah, dimensinya merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi, Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu :

- I. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi
- II. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan
- III. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 PE.09.03/LHP-673/PW11/3.2/2024 tanggal 24 Desember 2024 capaian nilai IEPK Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 2,910 dari target 2,700 dengan persentase capaian 107,78% (**Sangat Tinggi**) serta **mengalami peningkatan** sebesar 0,225 dari capaian tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa nilai IEPK Kabupaten Purbalingga masih pada **level 2 (berkembang)**..

**b. Persentase Tertanganinya Pengaduan yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi**

Penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi merupakan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pasal 5 point (d) tentang tugas dan fungsi Inspektorat yang berbunyi “pelaksanaan pengawasan dan pengaduan masyarakat”. Penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi sebenarnya telah menjadi Indikator Kegiatan pada Renstra Insektorat Daerah Tahun 2021-2026 yaitu pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu dengan capaian dari tahun 2021-2022 adalah 100%. Mendasari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah bahwa salah satu tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi, seluruh Inspektorat Daerah sudah selayaknya merespon dengan baik seluruh pengaduan masyarakat yang masuk, apalagi terkait indikasi adanya tindak pidana korupsi.

Capaian Indikator kinerja Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi Tahun 2024 adalah 100% (Sangat Tinggi) yaitu dari 5 (Lima) Pengaduan yang masuk, seluruh pengaduan telah tertangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, yang berarti seluruh pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dilakukan penanganan

Beberapa kendala/ hambatan/ tantangan dalam pencapaian sasaran indikator kinerja Penanganan Pengaduan masyarakat masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi antara lain :

1. Banyaknya pengaduan tindak pidana korupsi yang masuk melalui media sosial, APIP lain (BPKP, Inspektorat Provinsi) dan APH yang tidak langsung ditujukan ke APIP Kabupaten, sehingga penanganan pengaduan tersebut memerlukan prosedur yang Panjang sesuai dengan ketentuan
2. Banyak pengaduan masyarakat yang tidak disertai data dukung yang lengkap dan valid
3. Banyak pengaduan berkaitan dengan pejabat yang sudah tidak aktif, sehingga membutuhkan prosedur yang panjang terkait penelusuran bukti pendukung dan dokumen terkait lainnya.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja :

- a) Optimalisasi peran dan fungsi Irban Khusus, mendasari Perbup nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dimana Irban Pembantu Khusus yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi.
- b) Berkoordinasi secara intensif dengan APIP lain (BPKP, Inspektorat Provinsi), Kejaksaan serta Kepolisian selaku APH terkait penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi

## **2) Meningkatnya implementasi SAKIP Inspektorat Daerah**

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah yaitu Nilai SAKIP Inspektorat Daerah. Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga diperoleh nilai SAKIP Inspektorat Daerah sebesar 76,96 atau naik 0,65 dari Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 76,96 namun belum mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai 77,10. Dengan penilaian masing-masing komponen sebagai berikut :

**Tabel 2. 5**  
**Hasil Penilaian SAKIP Inspektorat**

KOMPONEN				Nilai Total
Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	
23,10	23,10	12	18,75	76,96

Beberapa Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dalam beberapa dokumen perencanaan masih terdapat sasaran program penunjang yang belum bersifat *intermediate outcome*.
2. Aplikasi pengumpulan dan pengukuran kinerja yaitu E-SAKIP ([sakup.purbalingga.go.id](https://sakup.purbalingga.go.id)) dan <https://e-kinerja.purbalinggakab.go.id> belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian organisasi.
3. Laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai upaya perbaikan kinerja yang dibutuhkan, hal ini ditunjukkan dengan adanya indikator kinerja yang belum tercapai yaitu Nilai Maturitas SPIP, Nilai SAKIP dan Nilai MCP.
4. Masih adanya rekomendasi berulang pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
5. Adanya penurunan rata-rata capaian kinerja tahunan Inspektorat Daerah dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut diantaranya :

1. Akan melakukan perbaikan dan reviu terhadap dokumen perencanaan agar sasaran program penunjang yang ditentukan bersifat *intermediate outcome*.
2. Inspektorat Daerah akan mendukung pengembangan dan konsisten dalam penggunaan Aplikasi Pengumpulan dan

Pengukuran Kinerja yang tersedia yaitu E-SAKIP dan E-KINERJA

3. Inspektorat Daerah akan meningkatkan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi perbaikan dalam laporan kinerja sehingga dapat memberikan perbaikan capaian kinerja yang diharapkan.
4. Inspektorat Daerah akan secara konsisten melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP dan memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti
5. Meningkatkan evaluasi dan efektifitas atas tindak lanjut rekomendasi perbaikan dalam laporan kinerja sehingga dapat memberikan perbaikan capaian kinerja yang diharapkan.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Masih lemahnya kesadaran Perangkat Daerah akan pentingnya penerapan SPIP
2. Masih banyaknya OPD yang belum memahami pentingnya manajemen risiko, sehingga adanya kendala saat penyusunan Manajemen Risiko Strategis dan Manajemen Risiko Operasional.
3. Masih adanya temuan hasil pemeriksaan yang berulang
4. Lemahnya kesadaran OPD dalam tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.
5. Kapasitas dan Kompetensi SDM yang masih perlu di tingkatkan.

6. Masih lemahnya pemahaman perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP

Berdasarkan permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Purbalingga dimasa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah :

1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menumbuhkan komitmen terhadap pentingnya SPIP pada setiap level jabatan di OPD
2. Meningkatkan Profesionalisme APIP dalam menjalankan peran sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* bagi SKPD dengan melaksanakan metode pemeriksaan yang komprehensif, analisis data yang akurat, laporan hasil pemeriksaan yang informatif dan berkualitas dengan tercukupinya Sumber Daya Manusia APIP baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Meningkatkan kesadaran Perangkat Daerah sebagai Auditan / obyek pemeriksaan maupun Rekanan / Pihak Ketiga dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) oleh APIP dan Aparat pengawas eksternal seperti BPK serta meningkatnya efektifitas kerjasama penanganan TLHP dengan pihak-pihak terkait.
4. Optimalisasi implementasi SPIP pada semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sehingga memperkuat sistem pengawasan melekat pada seluruh Birokrasi sehingga tidak akan terjadi penyelewangan yang berakibat pada temuan hasil pemeriksaan yang terus berulang setiap kali ada pemeriksaan.
5. Optimalisasi implementasi SAKIP pada semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sehingga dapat meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga.
6. Tercukupinya Anggaran Bidang Pengawasan untuk membangun sistem pengawasan Inspektorat Daerah berbasis teknologi informasi (IT) dalam rangka mewujudkan pengawasan Inspektorat yang lebih efektif dan efisien.

Sedangkan peluang bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan tugasnya adalah :

1. Cakupan tugas dan fungsi yang luas diantaranya adalah tugas dan fungsi assurance yang meliputi audit, evaluasi, reviu dan pemantauan serta asistensi dan pendampingan
2. Koordinasi dan dukungan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPKP terjalin dengan baik
3. Dukungan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Purbalingga, maka dapat ditetapkan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :

1. kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang masih perlu di tingkatkan
2. Tata kelola Pengawasan yang masih perlu di tingkatkan efektifitasnya dengan peningkatan pada Kapabilitas APIP, efektifitas Pengendalian Korupsi, dan akuntabilitas kinerja APIP, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada APIP

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Inspektorat Daerah
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya
3. Menyajikan dalam bentuk matrik dengan menempatkan program/kegiatan Inspektorat Daerah yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Inspektorat Daerah merupakan kegiatan lanjutan/prioritas yang sudah termuat dalam RKPD tahun 2026
5. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Inspektorat Daerah hasil reviu terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selama ini didasarkan pada arahan dan pedoman kebijakan program pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan program pengawasan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Sehingga, dikarenakan tugas pokok Inspektorat dalam bidang pengawasan, secara spesifik Inspektorat Daerah tidak menampung usulan program dan kegiatan dari Masyarakat.

Namun seiring dengan tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap birokrasi di Indonesia maka peran Inspektorat Daerah menjadi sangat penting. Selain itu, kemajuan teknologi yang semakin pesat dan maraknya penggunaan media sosial, nilai-nilai transparansi dalam tata kelola pemerintahan menjadi hal yang wajib dipenuhi.

Masyarakat menuntut pertanggungjawaban atas tata kelola pemerintahan pemerintahan pada umumnya, dan pengelolaan keuangan pada khususnya dapat diakses oleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan. Akibatnya, ketika terjadi indikasi adanya penyelewengan atas pengelolaan keuangan masyarakat akan langsung beraksi dengan melaporkan kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam bidang pengawasan. Disinilah peran Inspektorat dalam mengakomodir pengaduan dan aspirasi yang datang dari masyarakat, baik yang melalui Bupati, Inspektorat Daerah secara langsung maupun melalui Pihak-pihak eksternal, seperti Aparat Penegak Hukum (APH).

Pengaduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi awal tentang kebenaran informasi yang dilaporkan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pemeriksaan dilapangan. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga membuka seluas-luasnya setiap pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan dan prosedur. Berdasarkan data, tahun 2024 terdapat 5 aduan masyarakat secara langsung dan melalui daring yang telah ditindaklanjuti, sedangkan tahun 2023 terdapat 8 aduan yang telah ditindaklanjuti. Kemudian Inspektorat secara berkala melakukan survey kepuasan masyarakat/pengguna layanan untuk mengakomodir berbagai masukan

dan saran terkait dengan program, kegiatan serta layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat/pengguna layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja Inspektorat Daerah. Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat tersebut Inspektorat Daerah membuka layanan konsultasi baik secara langsung maupun *online* yaitu melalui Aplikasi berbasis web yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu **Silakonbima** (Sistem Layanan Konsultasi dan Bimbingan Auditee) terkait pengelolaan keuangan dan konsultasi lainnya untuk perangkat daerah maupun pemerintah desa di lingkungan Kabupaten Purbalingga.

## **2.6 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja**

Strategi untuk meningkatkan kinerja yang diperlukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, antara lain:

- a. Berkoordinasi dengan Bappelitbangda dan Bagian Organisasi Sekda dalam Upaya Peningkatan Kualitas Perencanaan dan kualitas Manajemen Risiko pada tingkat Pemda maupun OPD
- b. Mengoptimalkan peran Majelis TPKD dalam masalah atau sengketa yang berhubungan dengan keuangan negara maupun rekomendasi terkait dengan keuangan negara yang belum terselesaikan
- c. Membentuk Satgas/tim Khusus yang bertugas menyusun strategis dan melaksanakan upaya-upaya Peningkatan Kapabilitas APIP
- d. Memperbaiki dan Melengkapi kebijakan pengelolaan risiko, diantaranya strategi anti *fraud* serta evaluasi dan desain implementasi manajemen risiko
- e. Meningkatkan Koordinasi dengan dengan APIP lain (BPKP, Inspektorat Provinsi), Kejaksaan serta Kepolisian selaku APH dalam upaya pengendalian Korupsi
- f. Menanamkan Budaya Kinerja Organisasi dengan meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja serta Kualitas Evaluasi Kinerja untuk memastikan target-target / Tujuan Organisasi dapat Tercapai

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Surat Arah Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700.1.1.2/2644/IJ Tanggal 25 November 2024 perihal Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 bahwa :

1. Sasaran Pembinaan dan Penawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 diarahkan sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
2. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun berbasis prioritas dan risiko yang memperhatikan Asta Cita yang merupakan prioritas nasional Tahun 2025.
3. Pengawasan Tahun 2025 diprioritaskan kepada :

**a. Pengawasan capaian indikator ekonomi makro:**

- 1) Laju Pertumbuhan Penduduk
- 2) Tingkat Kemiskinan
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka
- 4) Indeks Modal Manusia
- 5) Rasio Gini
- 6) Intensitas Emisi GRK

**b. Pengawasan prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah**

a. Pelaksanaan pengawasan prioritas daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025, seperti:

- 1) pengendalian inflasi daerah;
- 2) investasi dan pelayanan publik;
- 3) penanganan *stunting*; dan
- 4) swasembada pangan.

b. Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau

- b. pemeriksaan kinerja.
- c. **Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui pelaksanaan *Monitoring Centre of Prevention (MCP)***
- d. **Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah meliputi**
  - 1) Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/303/IJ tanggal 14 Februari 2023 Hal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Daerah SE 2022 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);
  - 2) Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018;
  - 3) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018;
  - 4) Reviu LPPD dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; dan
  - 5) Pengawasan Keuangan Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020

**e. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah**

No	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola

2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i>
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah/APBD; d. pengawasan pengadaan barang dan jasa; e. pengawasan manajemen rumah sakit; f. audit kinerja; g. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; h. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; i. audit investigasi; j. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; k. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i> ; dan l. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

### 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026, dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 3 1**  
**Tujuan dan sasaran Strategis Inspektorat Daerah**  
**Tahun 2026**

TUJUAN INSPEKTORAT		INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2026
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3,090
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Jumlah nilai variabel penilaian kematangan perangkat daerah	55

SASARAN INSPEKTORAT		INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2026
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Rekomendasi x 100%	94,00
		Nilai Kapabilitas APIP	Hasil penjaminan kualitas BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	3,06
2	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Hasil penjaminan kualitas BPKP atas penilaian Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,975
		Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan dikalikan dengan 100%	100%
	Meningkatnya implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah	77,50

PROGRAM INSPEKTORAT		INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2026
1	Program Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah laporan yang disusun dibagi target laporan kali 100	100
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti dibagi Total temuan pengelolaan anggaran dikali 100	100
		Persentase Ketersediaan layanan	layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan	100

		kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	pemerintahan daerah yang tersedia dibagi total layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dibutuhkan dikali 100	
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	aset milik daerah yang terkelola dibagi total aset milik daerah dibagi 100	100
		Persentase pengadaan barang milik daerah	Jumlah Pengadaan Barang milik daerah : Total Barang yang dibutuhkan dikali 100	100
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara dibagi Total Barang milik daerah dikali 100	100
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik	nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik dibagi Total nilai potensi kerugian daerah/ negara x 100	73,2%
		Persentase Capaian Program Kerja Pengawasan	Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan dibagi Target Program Kerja Pengawasan Tahunan) dikali 100	100%
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendamping-an Dan Asistensi	Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	Hasil QA BPKP	2,90
		Nilai MCP (Area APIP)	Nilai MCP Korsupgah yang terverifikasi KPK	93,1
		Persentase Pengaduan Berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terbukti	Jumlah surat pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi surat penugasan dikali 100	100%

### 3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah

Berdasarkan isu dan strategi yang akan dilakukan sesuai dengan Visi Pada tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga akan mengusulkan program seperti yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tahun dengan 3 Program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sesuai dengan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan serta mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 maka Inspektorat menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 yang memiliki 3 Program, 12 Kegiatan, dan 32 Sub Kegiatan.

**Tabel 3 2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2026**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
<b>URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAH</b>		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja</b> <b>Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti</b> <b>Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b> <b>Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan</b> <b>Persentase pengadaan barang milik daerah</b> <b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1. Persentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan</b> <b>2. Persentase dokumen laporan disusun</b>
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Inspektorat Daerah
	2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja (LKPJ, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan RB) yang tersusun
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan</b>
	1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan</b>
	1) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Jam Latihan Pegawai</b>
	1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor</b>
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

	2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan
	4)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	5)	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	6)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>
	1)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	2)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Kebutuhan Jasa Kantor yang Tersedia</b>
	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umu Kantor yang Disediakan
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara</b>
	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	3)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>			<b>Persentase nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		<b>1. Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa</b> <b>2. Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</b>
	1)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	2)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
	3)	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
	4)	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
	5)	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa

	6)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa-an BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa-an APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
<b>2</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>		<b>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti</b>
	1)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
	2)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>			<b>1. Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)</b>
			<b>2. Nilai MCP Korsubgah (Area APIP)</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>		<b>Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan yang ditetapkan</b>
	1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>		<b>1. Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP korpsugah</b>
			<b>2. Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM</b>
	1)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
	2)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
	3)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	4)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya dengan memperhatikan beberapa pertimbangan yaitu :

1. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/SJ, dan Nomor HK.01.00/SE.3/K.D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah bahwa, KPK, Kemendagri, dan BPKP melakukan pemantauan terhadap pemenuhan alokasi anggaran pengawasan sesuai dengan ***mandatory spending*** pada APBD 2025. Selain itu tahun sebelumnya anggaran Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah yang terkecil dibandingkan dengan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah.
2. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Berikut rincian target capaian kinerja dan pendanaan Inspektorat tahun 2025 akan disajikan dalam tabel berikut :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						12.133.976.000,00							12.411.265.000,00	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						12.133.976.000,00							12.411.265.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						12.133.976.000,00							12.411.265.000,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				10.434.124.000,00						-	10.711.413.000,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				10.629.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dihambisif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkakan Efisiensi dan Transp aransi	-	-	10.629.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.110.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dihambisif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkakan Efisiensi dan Transp aransi	-		7.110.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	3.519.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dihambisif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkakan Efisiensi dan Transp aransi	-		3.519.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.752.155.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-	-	8.029.444.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				48 Orang/bulan	7.525.647.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		7.802.936.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	26.508.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		26.508.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	3.900.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	3.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	3.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		3.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-	-			-	668.462.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	668.462.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				48 Orang	456.500.000,00	Kab. Purballngga, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		456.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				48 Orang	211.962.000,00	Kab. Purballngga, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		211.962.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	130.030.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	130.030.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	91.030.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		91.030.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		24.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		6.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	932.100.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-	-	932.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	600.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Bertnteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	332.100.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Bertnteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		332.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	348.092.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Bertnteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-	-	348.092.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamisif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	275.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamisif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		275.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	16.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamisif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		16.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	55.992.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Men ingkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		55.992.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	588.756.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Men ingkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-	-	588.756.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				23 Unit	350.136.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Men ingkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		350.136.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				58 Unit	38.620.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Men ingkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		38.620.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Men ingkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-			-	1.220.588.000,00						-	1.220.588.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	1.051.878.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Men ingkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-	-	1.051.878.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				43 Laporan	143.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistik Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		143.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				42 Laporan	201.026.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistik Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		201.026.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Revisi Laporan Kinerja														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja</i>				132 Laporan	162.988.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistik Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		162.988.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Revisi Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan				1 Laporan	16.774.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamisasi Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		16.774.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				23 Laporan	161.553.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamisasi Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		161.553.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				33 Dokumen	366.537.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamisasi Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meni ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		366.537.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	168.710.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Men ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-	-	168.710.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	36.978.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Men ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		36.978.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				17 Laporan	131.732.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Men ngkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		131.732.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-			-	479.264.000,00						-	479.264.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	-	-			-	73.106.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	73.106.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	73.106.000,00	Kab. Purballangga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	73.106.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	406.158.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	406.158.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asisten Urusan Pemerintahan Daerah				8 perangkat daerah	128.123.000,00	Kab. Purballingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		128.123.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asisten, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asisten, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				21 perangkat daerah	13.034.000,00	Kab. Purballingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		13.034.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	141.607.000,00	Kab. Purballingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		141.607.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asisten dan Verifikasi Penegakan Integritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Vertifikasi Penegakan Integritas</i>				8 perangkat daerah	123.394.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistik Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Men ingkatkan Efisiensi dan Transp aransi	-		123.394.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
<b>J U M L A H</b>															12.411.265.000,00	

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam satu tahun. Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 diharapkan dapat bermanfaat dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi dan memperkecil resiko yang dapat mengancam kesinambungan kinerja organisasi dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) ini menyajikan target kinerja Inspektorat Daerah dan rencana kebutuhan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2026. Selain itu, Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan tolak ukur tingkat keberhasilan tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 yang tertuang dalam bentuk laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dalam menjalankan fungsi pengawalan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*).

Purbalingga, 2 Juni 2025  
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO.AP., M.Si  
Pembinia Utama Muda  
NIP. 19740706 199311 1 001

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Risk Register Inspektorat Daerah

### Risiko Strategis

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Purbalingga									
Nama OPD	Inspektorat Daerah									
Tahun Penilaian	2025									
Periode yang dinilai	2021-2016									
Tujuan Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemkab Purbalingga Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemda									
Urusan Pemerintahan	Pengawasan									
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	<b>Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah</b>	<b>Nilai Maturitas SPIP</b>	Pemenuhan elemen SPIP terkait manajemen risiko terhambat	RSO.2025.99.04.01	Inspektur	Kegiatan penilaian risiko tidak dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan serta Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Risiko	Internal	C	tidak terantisipasinya risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan	Bupati/APIP
			Internalisasi budaya pengendalian di seluruh unit kerja tidak optimal	RSO.2025.99.04.02	Inspektur	Kurang komitmen Pimpinan OPD tentang Pentingnya Penerapan SPIP	Internal	C	"Lingkungan Pengendalian" menjadi lemah.	Bupati/masyarakat
			OPD tidak menyusun Rencana Mitigasi Risiko maupun potensi kecurangan	RSO.2025.99.04.03	Inspektur	Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Penyusunan Fraud Control Plan	Internal	C	meningkatnya kemungkinan peristiwa yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi	Bupati/masyarakat

			OPD dan Pemda terlambat dalam melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	RSO.2025.99.04.04	Inspektur	Koordinasi antar tim Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi tidak berjalan dengan baik	Internal	C	Penjainan Kualitas atas PM SPIP terlambat	Bupati/ masyarakat
			Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi tidak dilaksanakan tepat waktu	RSO.2025.99.04.05	Irbawil III	Terlambatnya Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi	Internal	C	tidak dilakukan evaluasi atas PM SPIP oleh evaluator BPKP	Bupati/ masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai ditindaklanjuti	Keterlambatan Obrik dalam penyelesaian tidaklanjut Hasil Pemeriksaan	RSO.2025.99.04.06	Inspektur	Komitmen Pimpinan OPD dalam penyelesaian Tindaklanjut	Internal	C	terhambatnya proses penyelesaian potensi kerugian negara	Bupati/ masyarakat
		Nilai Kapabilitas APIP	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tidak dilaksanakan Tepat Waktu	RSO.2025.99.04.07	Sekretaris Inspektorat	Banyaknya tugas-tugas pengawasan mandatory	Internal	C	tidak dilakukan evaluasi atas PM Kapabilitas APIP oleh BPKP	Bupati/ masyarakat
	Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan Pengaduan yang berindikasi Korupsi	Nilai IEPK	Pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian Risiko Fraud belum dilaksanakan secara berkala	RSO.2025.99.04.08	Inspektur	Kurangnya kesadaran manajemen perangkat daerah dalam pengelolaan risiko fraud	Eksternal	C	Potensi kejadian fraud meningkat	Bupati/ masyarakat
			Kasus Gratifikasi meningkat	RSO.2025.99.04.09	Inspektur	Kurangnya Pemahaman tentang Etika dan Moral Kerja serta rendahnya integritas pegawai	Eksternal	C	Menurunnya kepercayaan publik dan meningkatnya risiko korupsi	Bupati/ masyarakat
			Pegawai tidak memanfaatkan saluran whistleblowing karena masih tidak percaya mekanisme perlindungan pelapor berjalan	RSO.2025.99.04.10	Irbansus	Kepercayaan terhadap mekanisme perlindungan pelapor kurang	Internal	C	Meningkatnya potensi kejadian korupsi dan penyalahgunaan wewenang	Bupati/ masyarakat
		Persentase tertanganinya Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	Terlambatnya Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	RSO.2025.99.04.11	Irbansus	Terganggunya Independensi Auditor	Internal	C	Aduan Masyarakat Tidak terselesaikan	Bupati/ masyarakat

	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Pelayanan yang diberikan tidak efektif dan tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.	RSO.2025.99.04.12	Inspektur	Evaluasi dokumen SOP Pelayanan belum dilaksanakan	Internal	C	Kepuasan pengguna layanan menurun	Bupati/ masyarakat
			Munculnya resistensi terhadap perubahan budaya organisasi	RSO.2025.99.04.13	Inspektur	1. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap budaya kinerja 2. Tekanan pekerjaan berlebihan pada pegawai	Internal	C	1. Kegagalan dalam penerapan kinerja 2. Kepuasan kerja pegawai menurun	Inspektur/ Instansi/ Inspektorat
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	tidak terselesaikannya Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	RSO.2025.99.04.14	Inspektur	pemahaman atas rekomendasi hasil evaluasi Kurang	Internal	C	menurunnya citra positif atas akuntabilitas kinerja Inspektorat	Inspektur/ Instansi/ Inspektorat

## Risiko Operasional

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
Nama OPD	: Inspektorat Daerah
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Tujuan Strategis	: 1. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah
Sasaran strategis OPD	: 1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 2. Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan Pengaduan yang Berindikasi Korupsi 3. Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pengawasan

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
							Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c					d	e	f	g	h	i	j	k	l
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>															
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa	154	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	4	Pelaporan	Keterlambatan penyusunan laporan ikhtisar	ROO.2025.99.04.01	Sub Bag Analisis dan Evaluasi	Pengumpulan data yang tidak tepat waktu	eksternal	C	manfaat menurun	Masyarakat / Bupati

				Lanjutan Hasil Pemeriksaan APIP	aan BPK RI dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP										
							Pelaksanaan	Ketidaktepatan dokumen tindak lanjut dengan Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/API P	ROO.2025.99.04.02	Sub Bag Analisis dan Evaluasi	Pemahaman Obrikan atas Rekomendasi Audit	eksternal	C	dokumen tindak lanjut tidak dapat diterima	Bupati
							Pelaporan	Kurangnya tertibnya pengarsipan dokumen tindak lanjut	ROO.2025.99.04.03	Sub Bag Analisis dan Evaluasi	Kelalaian Petugas Arsip	internal	C	hilangnya dokumen tindak lanjut Obrikan	Obrikan/Bupati
							Pelaksanaan	Rekomendasi APIP sudah tidak relevan untuk ditindaklanjuti	ROO.2025.99.04.04	Tim Pemeriksa	Perubahan Regulasi	eksternal	C	Rekomendasi tidak dapat dilaksanakan	Obrikan/Bupati
2	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa	154	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	39	Pelaporan	Keterlambatan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	ROO.2025.99.04.05	Irbanwil	Penyusunan program kerja audit tidak handal	Internal	C	Hasil Pemeriksaan kurang bermanfaat Hasil Rekomendasi	Objek pemeriksaan/ Bupati

															sudah tidak relevan lagi	
							Pelaksanaan	Dokumen Pendukung Pengawasan Kinerja tidak dapat diperoleh tepat waktu	ROO.2025.99.04.06	Inspektur	Tidak tertibnya pencatatan dan pengelolaan keuangan obrik	Eksternal	C	Terganggunya proses audit	APIP/ Bupati/ Masyarakat	
							Pelaporan	Rekomendasi hasil pengawasan laporan kinerja tidak tepat	ROO.2025.99.04.07	Tim pemeriksa	Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam dan kekeliruan dalam mengambil kriteria audit			Rekomendasi tidak dapat diterapkan dan ditindaklanjuti	Obyek Pemeriksaan, Bupati, Instansi	
3	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa	154	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan	52	Pelaporan	Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	ROO.2025.99.04.08	Sub Bag Analisis dan Evaluasi	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	internal	C	Manfaat Hasil Pemeriksaan Menurun Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	APIP/Bupati/ masyarakat	

							Pelaksanaan	Dokumen pendukung kegiatan pengawasan keuangan tidak didapatkan tepat waktu	ROO.2025.99.04.09	Tim Pemeriksa	tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Obrik	eksternal	C	Terganggunya Proses Audit	Obrik/Bupati
							Pelaksanaan	Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam	ROO.2025.99.04.10	Tim Pemeriksa	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	internal	C	Hasil Audit tidak dapat digunakan untuk pengam bilan kebijaksanaan	Objek Pemeriksaan/Bupati
							Pelaksanaan	Kesalahan dalam Penetapan Jumlah Objek, ruang lingkup dan sasaran Pengawasan internal	ROO.2025.99.04.11	Sekretariat, Irban	Kurang cermat dalam Penyusunan PKPT berbasis Risiko	internal	C	Tujuan audit tidak tercapai/ hasil audit kurang bermanfaat	Bupati, Obrik, Inspektoral
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa	154	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Kinerja	123	Pelaporan	Keterlambatan Penyusunan LHR Kinerja	ROO.2025.99.04.12	Irbanwil	Penyusunan Program Kerja Reviu tidak handal	internal	UC	Hasil Pemeriksaan kurang bermanfaat Hasil Rekomendasi sudah tidak	Objek Pemeriksaan/Bupati

														relevan lagi	
							Pelaporan	Rekomen dasi hasil reviu laporan kinerja tidak tepat	ROO.2025. 99.04.13	Tim pemeriks a	Analisa data Pemeriksaa n tidak mendalam dan kekeliruan dalam mengambil kriteria audit			Rekome ndasi tidak dapat diterapka n dan ditindakl anjuti	Obyek Pemerik saan, Bupati, Instansi
4	Penyelen ggaraan Pengawa san Internal	Jumlah Objek Pengawa san yang diperiksa	154	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Keuangan	1	Pelaporan	Laporan Hasi Reviu Laporan Keuanga n tidak disusun tepat waktu	ROO.2025. 99.04.14	Irbanwil 3, Tim Pemeriks a	1. OPD tidak menyusun Laporan Keuangan tepat waktu 2. Kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan	internal	C	1. Tidak mendap at predikat WTP 2. Citra Instansi buruk	Bupati
5	Penyelen ggaraan Pengawa san Internal	Jumlah Objek Pengawa san yang diperiksa	154	Pengawa san Desa	Jumlah Laporan Pengawa san Desa	23	Pelaporan	Keterlam batannya Penyusu nan Laporan Hasil Pengawa san Desa	ROO.2025. 99.04.15	Sub Bag Analisis dan Evaluasi, Tim Pemeriks a	Penyusuna n Program Kerja Audit tidak handal	internal	UC	Manfaat Hasil Pemerik saan Menurun Hasil Rekome ndasi sudah tidak relevan lagi	Objek Pemerik saan/ Bupati

										Tim Pemeriksa	tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Obrik	eksternal	C	Terganggunya Proses Audit	APIP/Bupati/masyarakat
							Pelaksanaan	Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas Pengawasan Desa	ROO.2025.99.04.16	Tim Pemeriksa	Tekanan dari pihak-pihak tertentu	eksternal	C	Hasil Audit tidak menggambarkan Kondisinya sebenarnya	APIP/Bupati/masyarakat
6	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	28	Pelaporan	Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	ROO.2025.99.04.17	Tim Pemeriksa	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	internal	C	Manfaat Hasil Pemeriksaan Menurun Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	Objek Pemeriksaan/Bupati
							Pelaksanaan	penanganan pengaduan terhambat	ROO.2025.99.04.18	Tim Pemeriksa	Data dukung/bukti awal tidak memadai	eksternal	C	terhambatnya kegiatan pengawasan	Masyarakat / APIP
							Pelaksanaan	Dokumen Pendukung Pemeriksaan Dengan Tujuan	ROO.2025.99.04.19	Tim Pemeriksa	tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan	eksternal	C	Terganggunya Proses Audit	APIP/Bupati/masyarakat

								Tertentu tidak dapat didapatkan tepat waktu			Keuangan Obrik				
							Pelaksanaan	Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas PDDT	ROO.2025.99.04.20	Tim Pemeriksa	Tekanan dari pihak-pihak tertentu	eksternal	C	Hasil Audit tidak menggambarkan Kondisi sebenarnya	APIP/Bupati/masyarakat
							Pelaksanaan	Kegagalan Auditor dalam mengidentifikasi Permasalahan dalam Audit Investigasi	ROO.2025.99.04.21	Tim Pemeriksa	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	internal	C	Hasil Audit tidak dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan	Obrik/Bupati
7	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	2	Pelaksanaan	Hasil Perhitungan Kerugian Negara/ Daerah tidak tepat	ROO.2025.99.04.22	Tim Pemeriksa/ Inspektur	Analisis tidak memadai da kapasitas SDM yang kurang	internal	C	Potensi kerugian negara tidak dapat ditarik	APIP/Bupati/masyarakat
							Pelaksanaan	Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan	ROO.2025.99.04.23	Tim Pemeriksa	Tekanan dari pihak-pihak tertentu	eksternal	C	Hasil Audit tidak menggambarkan Kondisi sebenarnya	APIP/Bupati/masyarakat

								kan tugas PKKN							
							Pelaksanaan	Lambatnya proses penyelesaian kerugian negara/daerah	ROO.2025.99.04.24	Tim Pemeriksa	Dokumen tidak lengkap atau tidak segera disampaikan oleh unit terkait	eksternal	C	Penurunan efektivitas pemulihan kerugian dan potensi kehilangan aset negara/daerah	APIP/Bupati/masyarakat
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN ASISTENSI</b>															
7	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100	Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	3	Pelaksanaan	Tingginya beban kerja APIP	ROO.2025.99.04.25	Tim Audit/Sub Bag Perencanaan	Banyaknya penugasan mandatory	eksternal	UC	Pelaksanaan PKPT kurang maksimal	APIP/Bupati/masyarakat
							Pelaporan	Penyusunan PPBR Tidak selesai tepat waktu	ROO.2025.99.04.26	Sub Bag Perencanaan	tidak tersedianya data faktor Risiko Obrik	eksternal	C	Keterlambatan Penyusunan PKPT	APIP/Bupati/masyarakat
8	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan MCP	4 Laporan	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampi	8	Pelaksanaan	Evidence SPIP yang tidak sesuai	ROO.2025.99.04.27	Irbansus	Kurangnya pemahaman Asesor Pemda dan OPD	eksternal	C	Nilai Maturitas SPIP mengalami	APIP/Bupati/masyarakat

		Korsupgah		han Daerah	ngan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah						tentang SPIP			penurunan	
9		Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	5 Laporan	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21	Pelaksanaan	Ketidaksiuaian Rencana Aksi dengan Rekomendasi Hasil evaluasi maupun dengan Indikator Kegiatan Utama General dan tema tematik	ROO.2025.99.04.28	Irbanwil	Ketidakpahaman terhadap rekomendasi MenpanRB	eksternal	C	Rencana aksi tidak mempengaruhi capaian kinerja	APIP/Bupati/masyarakat
							Pelaksanaan	Rencana Aksi tidak dilaksanakan tepat waktu	ROO.2025.99.04.29	Irbanwil	kurangnya komitmen perangkat daerah	eksternal	C	Pelaksanaan rencana aksi tidak mendukung pencapaian kinerja	APIP/Bupati/masyarakat
							Pelaporan	Laporan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi tidak disusun tepat waktu	ROO.2025.99.04.30	Irbanwil	Kurangnya pemahaman tim evaluator	internal	C	Rekomendasi hasil evaluasi internal tidak dapat diterapkan	APIP/Bupati/masyarakat

10				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	8	Pelaksanaan	Ketidaksuaian dokumen Pendukung/ Evidance Penilaian Mandiri Zona Integritas	ROO.2025.99.04.31	Irban I	Kurangnya pemahaman tim pembangunan Zona Integritas (ZI) atas Lembar Kerja Evaluasi ZI	internal	C	Dokumen bukti tidak diterima	APIP/Bupati/masyarakat
							Pelaksanaan	OPD tidak segera melaksanakan Perbaikan/tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB terkait Penilaian Zona Integritas	ROO.2025.99.04.32	Irban i	perbedaan tafsir antar tim Pembangunan Zona Integritas terkait rekomendasi Kemenpan RB	internal	C	tidak ada perbaikan kondisi atas rekomendasi Kemenpan RB	APIP/Bupati/masyarakat
11	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	2 Laporan	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	Pelaksanaan	Terlambatnya Pemenuhan dokumen Pendukung/ Evidance penilaian MCP korsupgah	ROO.2025.99.04.33	Irbanwil	Kurangnya koordinasi Tim MCP Korsupgah	internal	C	Dokumen bukti tidak diterima	APIP/Bupati/masyarakat

							Pelaksanaan	Dokumen Bukti tidak sesuai dengan permintaan verifikator	ROO.2025.99.04.34	Irbanwil	Kurangnya koordinasi Tim MCP Korsupgah	internal	C	Dokumen bukti tidak diterima	APIP/ Bupati/ masyarakat
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>															
12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100,00%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Inspektorat Daerah	3	Pelaporan	Dokumen perencanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan	ROO.2025.99.04.35	Sub Bag Perencanaan	Pedoman yang dinamis	eksternal	UC	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan	ASN Perangkat Daerah
							Pelaporan	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan	ROO.2025.99.04.36	Sub Bag Perencanaan	data yang belum lengkap	Internal	C	Manfaat menurun	Instansi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan disusun	100,00%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Pelaporan	Data kinerja tidak valid	ROO.2025.99.04.37	Sub Bag Perencanaan	Data tidak akurat	Internal	C	Pengambilan Keputusan kurang tepat	Instansi
							Pelaporan	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen	ROO.2025.99.04.38	Sub Bag Perencanaan	data yang belum lengkap	Internal	C	Manfaat menurun	Instansi

								evaluasi kinerja							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100,00%	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	Pelaporan	Kesalahan data kepegawaian	ROO.2025.99.04.39	Sub Bag Adum	Data kepegawaian yang tidak diupdate secara berkala	Internal	C	Keterlambatan penyesuaian data kepegawaian	ASN Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Pelaporan	Dokumen Administrasi Pencairan Tidak Lengkap	ROO.2025.99.04.40	Sub Bag Adum	Penyusunan Dokumen Kelengkapan Terlambat	Internal	C	Keterlambatan Pencairan Pembayaran	ASN Perangkat Daerah
				Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Pelaksanaan	Dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN tidak lengkap	ROO.2025.99.04.41	Sub Bag Adum	Kurangnya integritas pegawai	Internal	C	Menghambat proses verifikasi, pencairan anggaran, atau proses administrasi lainnya	ASN Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100,00%	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	48	Pelaksanaan	Ketidaksuaian Kompetensi Diklat dengan Kebutuhan	ROO.2025.99.04.42	Sub Bag Adum	Analisis kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan kurang tepat	eksternal	C	Kompetensi tidak meningkat	Instansi, APIP

					n dan Pelatihan										
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	100,00%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	9 Paket	Pelaksanaan	Pengangan Bahan Logistik Kantor tidak sesuai kebutuhan	ROO.2025.99.04.43	Sub Bag Adum	stock opname persediaan ATK tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan	Internal	C	Jumlah ATK tidak sesuai	ASN Perangkat Daerah
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Pelaksanaan	Pengangan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak sesuai kebutuhan	ROO.2025.99.04.44	Sub Bag Adum	Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang fluktuatif	Internal	C	Terganggunya aktivitas kerja pegawai	ASN Perangkat Daerah
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	Pelaksanaan	Rapat yang tidak terjadwal dengan baik	ROO.2025.99.04.45	Sub Bag Adum	Koordinasi kurang efektif	Internal	C	Kurangnya Partisipasi peserta rapat	ASN Perangkat Daerah
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Pelaksanaan	Kesalahan jadwal dan jumlah kunjungan tamu	ROO.2025.99.04.46	Sub Bag Adum	Kurangnya Koordinasi	Eksternal	UC	Kunjungan Tamu tidak terfasilitasi	OPD

														dengan baik	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Pelaksanaan	Kesalahan Input atau Pelaporan	ROO.2025.99.04.47	Sub Bag Adum	Kurang Cermatnya operator aplikasi	Internal	C	Ketidaksesuaian dalam penyusunan Laporan	Instansi/ASN Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30 unit	Pelaksanaan	Keterlambatan proses pengadaan	ROO.2025.99.04.48	Sub Bag Adum	Keterlambatan penyusunan dokumen pengadaan/persyaratan pengadaan	Internal	C	Pemanfaatan barang yang kurang optimal	Instansi/ASN Perangkat Daerah
							Pelaksanaan	Kualitas barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	ROO.2025.99.04.49	Sub Bag Adum	Pejabat pengadaan tidak memeriksa kesesuaian barang diterima	Internal	C	tidak dapat digunakan sebagai mana mestinya	Instansi/ASN Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100,00%	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	Pelaksanaan	Kesalahan Input data Aset	ROO.2025.99.04.50	Sub Bag Adum	Kurangnya Pengendalian dan Pengawasan	Internal	C	Selisih Data Laporan BMD	Instansi

	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Kantor yang Tersedia	100,00%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Pelaksanaan	Keterlambatan pemenuhan penggajian PTT	ROO.2025.99.04.51	Sub Bag Perencanaan	Keterlambatan pengajuan GU	eksternal	UC	Hak PTT tidak terpenuhi	ASN Perangkat Daerah
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Pelaksanaan	Keterlambatan dalam pembayaran tagihan	ROO.2025.99.04.52	Sub Bag Adum	Besarnya tagihan listrik yang sulit terprediksi dan Keterlambatan tagihan internet	eksternal	UC	koneksi internet yang kurang cepat	ASN Perangkat Daerah
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Pelaksanaan	Kehilangan atau Salah Distribusi Surat	ROO.2025.99.04.53	Sub Bag Adum	Kesalahan penulisan tujuan distribusi surat	Internal	C	Informasi tidak tersampaikan	OPD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100,00%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	Pelaksanaan	Pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan tidak dibayarkan tepat waktu	ROO.2025.99.04.54	Sub Bag Adum	Kelalaian Pengguna Aset	Internal	C	Adanya denda pembayaran pajak	Instansi

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 unit	Pelaksanaan	Rincian anggaran yang disusun tidak sesuai kebutuhan	ROO.2025.99.04.55	Sub Bag Adum	Banyaknya aset yang harus terpelihara	Internal	UC	Pemeliharaan aset tidak optimal	Instansi
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Rehabilitasi	1 unit	Pelaksanaan	Biaya melebihi anggaran	ROO.2025.99.04.56	Sub Bag Adum	Perencanaan yang tidak optimal	Internal	C	pemeliharaan gedung kantor tertunda	Instansi

Matriks Lembar Kerja  
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA/PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2026

BARIS 1	URUSAN		Pengawasan
	NAMA OPD		Inspektorat Daerah
	PROGRAM		Program Penunjang Urusan Pemerintah
	KEGIATAN		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	SUB KEGIATAN		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	TUJUAN SUB BIDANG		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperlihara/direhabilitasi
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah fasilitas jalan disabilitas yang sudah ada (ram, guiding block, pegangan tangan) : 0</li> <li>Jumlah titik akses publik tanpa fasilitas disabilitas : 5</li> </ol>
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	Penyandang disabilitas (baik laki-laki maupun perempuan) tidak memiliki akses fisik karena ketiadaan jalan disabilitas di seluruh titik yang ada.
		Sebab Kesenjangan Internal	Kurangnya pemahaman pegawai terkait standar aksesibilitas.
		Sebab Kesenjangan Eksternal	Keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan, sehingga alokasi untuk aksesibilitas sering terabaikan
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Menjamin fasilitas gedung kantor inklusif dan aksesibel bagi semua kelompok masyarakat
BARIS 5	RENCANA AKSI		<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan identifikasi kebutuhan fasilitas disabilitas di lingkungan kantor</li> <li>Menyusun anggaran pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas disabilitas.</li> <li>Melakukan pengadaan pemeliharaan/rehabilitas fasilitas disabilitas</li> <li>Monitoring dan evaluasi</li> </ol>
BARIS 6	BASELINE DATA		
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperlihara/direhabilitasi Target Kinerja: 1 Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperlihara/direhabilitasi
Immediate Outcome/Kegiatan		Indikator Kinerja: Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara Target Kinerja: 100	
Intermediate Outcome/Program		Indikator Kinerja: Persentase pemeliharaan barang milik daerah Target Kinerja : 100%	
Optimum Outcome/Sasaran		Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Inspektorat Target Kinerja: 77,50	
Dampak/Tujuan		Indikator Kinerja: Nilai kematangan perangkat daerah Target Kinerja: 55	

BARIS 1	URUSAN		PENGAWASAN
	NAMA OPD		INSPEKTORAT DAERAH
	PROGRAM		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
	KEGIATAN		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	SUB KEGIATAN		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	TUJUAN SUB BIDANG		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		Total Jumlah Pegawai: 49 Pernah mengikuti pelatihan PUG sebelumnya - Laki-laki : - Perempuan : 3
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	Belum keseluruhan pegawai Inspektorat Daerah memahami PUG
		Sebab Kesenjangan Internal	Pelatihan PUG belum dijadwalkan secara berkala dan belum menjangkau semua pegawai.
		Sebab Kesenjangan Eksternal	
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengintegrasikan perspektif gender pada pelaksanaan tugas.
BARIS 5	RENCANA AKSI		Urutkan tahapan kegiatan dari pembentukan panitia hingga ke pelaksanaan dan monev: 1. Menentukan Koordinator Pelaksanaan 2. Identifikasi peserta sosialisasi dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan / kelompok rentan lainnya 3. Identifikasi Narasumber 4. Pengiriman undangan dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan / kelompok rentan lainnya 5. Pelaksanaan kegiatan 6. Monev
BARIS 6	BASELINE DATA		Total Jumlah Pegawai: 49 1. Pernah mengikuti pelatihan PUG sebelumnya - Laki-laki : 2 - Perempuan : 5
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Target Kinerja: 48 Orang
		Immediate Outcome/ Kegiatan	Indikator Kinerja: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Target Kinerja: Persentase Terpenuhinya Jam Latihan Pegawai
		Intermediate Outcome/ Program	Indikator Kinerja: Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Target Kinerja : 100%
		Optimum Outcome/ Sasaran	Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Target Kinerja: 77,5
		Dampak/ Tujuan	Indikator Kinerja: Nilai Maturitas SPIP Target Kinerja: 3,090

BARIS 1	URUSAN		Pengawasan
	NAMA OPD		Inspektorat Daerah
	PROGRAM		Program Penyelenggaraan Pengawasan
	KEGIATAN		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	SUB KEGIATAN		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	TUJUAN SUB BIDANG		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kegiatan Monev PUG yang dilakukan : 1</li> <li>2. Jumlah rekomendasi hasil Monev yang ditindaklanjuti : 5</li> </ol>
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	Masih ditemukannya OPD yang belum menyusun PPRG dan pemenuhan terhadap indikator pelaksanaan PUG
		Sebab Kesenjangan Internal	Kapasitas SDM pelaksana Monev PUG belum memadai
		Sebab Kesenjangan Eksternal	Proses Monev PUG belum melibatkan perwakilan masyarakat, terutama kelompok perempuan, disabilitas, dan rentan lainnya.
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		<b>Memastikan kinerja pemerintah daerah berkeadilan dan setara bagi seluruh gender.”</b>
BARIS 5	RENCANA AKSI		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan PKPT terkait Monev PUG</li> <li>2. Penetapan PKPT</li> <li>3. Rapat koordinasi internal membahas penugasan Monev PUG</li> <li>4. Penyusunan Surat Tugas</li> <li>5. Pelaksanaan Monev PUG</li> <li>6. Penyusunan LHM PUG</li> <li>7. Pendistribusian LHM ke OPD terkait</li> <li>8. Monev</li> </ol>
BARIS 6	BASELINE DATA		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kegiatan Monev PUG yang dilakukan : 1</li> <li>2. Jumlah rekomendasi hasil Monev yang ditindaklanjuti : 5</li> </ol>
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output/ Sub Kegiatan (Ambil dari Renja)	Indikator Kinerja: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Target Kinerja: 39
		Immediate Outcome/ Kegiatan (Ambil dari Renstra)	Indikator Kinerja: Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa Target Kinerja: 154
		Intermediate Outcome/ Program (Ambil dari Renstra)	Indikator Kinerja: Persentase Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan Target Kinerja : 100%
		Optimum Outcome/ Sasaran (Ambil dari Renstra)	Indikator Kinerja: Nilai Kapabilitas APIP Target Kinerja: 3,060
		Dampak/ Tujuan (Ambil dari Renstra)	Indikator Kinerja: Nilai Maturitas SPIP Target Kinerja: 3.090

Purbalingga, 16 Juli 2025  
INSPEKTOR INSPEKTORAT DAERAH  
PURBALINGGA



TO SUSANTO.AP., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740706 199311 1 001

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
TAHUN 2026**

**NAMA OPD** : Inspektorat Daerah  
**URUSAN YANG DIAMPU**: Pengawasan  
**KABUPATEN/KOTA** : Kabupaten Purbalingga  
**PROVINSI** : Jawa Tengah  
**TAHUN ANGGARAN** : 2026

<b>PROGRAM</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
<b>KEGIATAN</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<b>SUB KEGIATAN</b>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
<b>ANALISIS SITUASI (Ambilkan baris 2 dan 3 pada GAP)</b>	<p>Mendasari Data Pembuka Wawasan terkait Pengarusutamaan Gender, masih dijumpai beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>3. Jumlah fasilitas jalan disabilitas yang sudah ada (ram, guiding block, pegangan tangan) : 0</p> <p>4. Jumlah titik akses publik tanpa fasilitas disabilitas : 5</p> <p>Fasilitasi disabilitas yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan upaya penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas, agar mereka dapat mengakses fasilitas publik secara aman, nyaman, dan mandiri.</p> <p>Definisi fasilitasi disabilitas merujuk pada proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur yang mempertimbangkan kebutuhan khusus bagi individu dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau intelektual. Konsep ini didukung oleh teori aksesibilitas universal, yang menekankan bahwa desain lingkungan harus dapat digunakan oleh semua orang tanpa memerlukan adaptasi tambahan, serta teori inklusi sosial yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk terlibat penuh dalam kehidupan bermasyarakat.</p> <p>Berdasarkan data yang ada, di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga belum tersedia sama sekali fasilitas jalan disabilitas seperti ram, guiding block, maupun pegangan tangan, sementara terdapat lima titik akses publik yang belum dilengkapi sarana pendukung aksesibilitas tersebut. Kondisi ini mengakibatkan penyandang disabilitas, baik laki-laki maupun perempuan, mengalami hambatan fisik yang signifikan untuk mengakses layanan dan ruang publik, sehingga berpotensi mengurangi partisipasi mereka dalam aktivitas pemerintahan maupun sosial. Faktor penyebab permasalahan ini antara lain kurangnya pemahaman pegawai mengenai standar aksesibilitas yang sesuai peraturan, keterbatasan alokasi anggaran yang mengakibatkan pembangunan fasilitas ramah disabilitas sering kali tidak menjadi prioritas, serta kebijakan pembangunan yang masih lebih berfokus pada infrastruktur umum tanpa mempertimbangkan kelompok rentan.</p> <p>Oleh karena itu, penyelenggaraan fasilitasi disabilitas menjadi sangat penting tidak hanya untuk memenuhi ketentuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan kerja dan pelayanan publik yang inklusif, setara, dan berkeadilan. Implementasi yang tepat akan mendorong partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan citra positif institusi, serta memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan hak bagi semua warga..</p>	
<b>RENCANA TINDAK</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	<b>Tujuan Sub kegiatan Responsif gender</b>	Menjamin fasilitas gedung kantor inklusif dan aksesibel bagi semua kelompok masyarakat
	<b>Rencana Tindak</b>	5. Melakukan identifikasi kebutuhan fasilitas disabilitas di lingkungan kantor 6. Menyusun anggaran pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas disabilitas.

		7. Melakukan pengadaan pemeliharaan/rehabilitas fasilitas disabilitas 8. Monitoring dan evaluasi
<b>ALOKASI SUMBER DAYA</b>	<b>Anggaran</b>	Rp. 200.000.000,00
	<b>SDM</b>	a. PA b. PPTK c. PPK d. Tim Teknis
	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAB</li> <li>• Laptop</li> <li>• Material</li> </ul>
Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperlihara/direhabilitasi Target Kinerja: 1 Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperlihara/direhabilitasi	
Immediate Outcome/Kegiatan	Indikator Kinerja: Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara Target Kinerja: 100	
Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: Persentase pemeliharaan barang milik daerah Target Kinerja : 100%	
Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Inspektorat Target Kinerja: 77,50	
Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Nilai kematangan perangkat daerah Target Kinerja: 55	

<b>PROGRAM</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
<b>KEGIATAN</b>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
<b>ANALISIS SITUASI (Ambilkan baris 2 dan 3 pada GAP)</b>	<p>Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi pembangunan yang bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan di seluruh sektor. Dalam konteks Inspektorat Daerah, pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) PUG menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip gender, khususnya dalam tugas pengawasan dan evaluasi program pemerintah.</p> <p>Secara teoritis, pelaksanaan Bimtek PUG didukung oleh teori keadilan sosial dan teori feminisme institusional yang menekankan pentingnya kesetaraan akses dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga publik. Teori-teori ini menjelaskan bagaimana institusi dapat menjadi alat perubahan sosial dengan menyadari dan mengoreksi ketimpangan struktural berbasis gender. Melalui pelatihan, pegawai dibekali pemahaman kritis dan teknis tentang analisis gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), serta pengawasan berbasis gender.</p> <p>Data internal menunjukkan bahwa dari total 50 pegawai Inspektorat Daerah, hanya 3 orang yang pernah mengikuti pelatihan PUG, terdiri dari 3 orang perempuan. Ini berarti 94% pegawai belum pernah mendapatkan pelatihan tersebut. Fakta ini mengindikasikan perlunya penyelenggaraan Bimtek secara menyeluruh agar seluruh pegawai memiliki pengetahuan dasar dan pemahaman yang setara mengenai PUG. Kegiatan pelatihan sebelumnya juga tampaknya belum dijadwalkan secara rutin dan belum menjangkau seluruh elemen organisasi, sehingga menciptakan ketimpangan kapasitas yang dapat menghambat kinerja lembaga, terutama dalam pelaksanaan pengawasan yang berperspektif gender.</p>

	<p>Pentingnya pelaksanaan Bimtek PUG juga sejalan dengan amanat regulasi nasional, seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, yang mengharuskan seluruh instansi pemerintah melaksanakan strategi PUG secara terintegrasi. Di samping memenuhi kewajiban regulatif, Bimtek ini juga meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme pegawai Inspektorat dalam memberikan masukan yang lebih adil dan responsif terhadap isu-isu gender, baik dalam program pembangunan maupun kebijakan publik.</p> <p>Dengan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan terbentuk budaya organisasi yang lebih inklusif, serta kemampuan internal lembaga untuk mengawal implementasi PUG di perangkat daerah lainnya. Selain itu, pelaksanaan Bimtek PUG juga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja kelembagaan dalam reformasi birokrasi dan penilaian evaluasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan Bimtek PUG perlu dilakukan secara lebih terencana, merata, dan dievaluasi secara berkala untuk menjamin efektivitasnya.</p>	
<b>RENCANA TINDAK</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	<b>Tujuan Sub kegiatan Responsif gender</b>	Meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengintegrasikan perspektif gender pada pelaksanaan tugas.
	<b>Rencana Tindak</b>	Urutkan tahapan kegiatan dari pembentukan panitia hingga ke pelaksanaan dan monev: 7. Menentukan Koordinator Pelaksanaan 8. Identifikasi peserta sosialisasi dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan / kelompok rentan lainnya 9. Identifikasi Narasumber 10. Pengiriman undangan dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan / kelompok rentan lainnya 11. Pelaksanaan kegiatan 12. Monev
<b>ALOKASI SUMBER DAYA</b>	<b>Anggaran</b>	556.500.000,00
	<b>SDM</b>	1. Narasumber 2. Moderator 3. Peserta
	<b>Peralatan dan Mesin</b>	1. Modul 2. Alat Tulis 3. Proyektor 4. Laptop
Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Target Kinerja: 48 Orang	
Immediate Outcome/Kegiatan	Indikator Kinerja: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Target Kinerja: Persentase Terpenuhinya Jam Latihan Pegawai	
Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Target Kinerja : 100%	

Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Target Kinerja: 77,5
Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Nilai Maturitas SPIP Target Kinerja: 3,090

<b>PROGRAM</b>	Penyelenggaraan Pengawasan	
<b>KEGIATAN</b>	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
<b>SUB KEGIATAN</b>	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
<b>ANALISIS SITUASI (Ambilkan baris 2 dan 3 pada GAP)</b>	<p>Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah telah mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan hasilnya. Dalam konteks Inspektorat Daerah, Monev PUG tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kinerja yang memastikan bahwa prinsip kesetaraan dan keadilan gender benar-benar terwujud dalam tata kelola pemerintahan. Definisi ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah, yang menegaskan bahwa Monev adalah bagian integral dari siklus manajemen pembangunan responsif gender.</p> <p>Dalam praktiknya, pentingnya penyelenggaraan Monev PUG oleh Inspektorat Daerah dapat dilihat dari data yang tersedia. Pada periode tertentu, jumlah kegiatan Monev PUG yang dilakukan tercatat hanya satu kali, namun menghasilkan lima rekomendasi yang ditindaklanjuti. Data ini menunjukkan bahwa meskipun frekuensi Monev relatif rendah, kegiatan tersebut memberikan dampak nyata melalui rekomendasi perbaikan yang direspons oleh perangkat daerah. Namun, rendahnya frekuensi Monev berpotensi membatasi ruang deteksi dini terhadap permasalahan PUG, sehingga kegiatan ini perlu ditingkatkan intensitasnya. Keberhasilan dalam menindaklanjuti rekomendasi membuktikan bahwa Monev PUG memiliki peran strategis dalam mendorong OPD untuk memperbaiki kelemahan implementasi PUG, khususnya pada aspek perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.</p> <p>Penyelenggaraan Monev PUG ini menjadi semakin mendesak mengingat masih ditemukannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta belum memenuhi indikator pelaksanaan PUG secara menyeluruh. Ketidadaan PPRG di sebagian OPD menandakan bahwa proses integrasi gender dalam dokumen perencanaan belum berjalan optimal. Hal ini dapat berdampak pada terjadinya ketidakmerataan manfaat program pembangunan antara laki-laki dan perempuan, serta berpotensi mengabaikan kebutuhan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak, dan lansia. Monev PUG diharapkan mampu menjadi alat ukur sekaligus pengingat bagi OPD agar segera memenuhi kewajiban tersebut.</p> <p>Penyebab perlunya dilaksanakan Monev PUG secara konsisten juga dapat ditelusuri dari kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan oleh OPD. Banyak OPD yang belum memiliki mekanisme pengumpulan data terpilah gender, sehingga sulit bagi Inspektorat untuk melakukan analisis kesenjangan yang akurat. Di sisi lain, komitmen pimpinan OPD terhadap PUG sering kali bervariasi; ada yang menjadikan PUG sebagai prioritas, namun ada pula yang menganggapnya sebagai beban administratif. Budaya kerja yang belum sepenuhnya responsif gender turut menjadi tantangan dalam implementasi PUG. Dengan demikian, Monev PUG tidak hanya berfungsi untuk mengevaluasi kinerja, tetapi juga sebagai sarana advokasi kebijakan dan peningkatan kapasitas OPD dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan setara.</p> <p>Melalui pelaksanaan Monev PUG yang terstruktur dan berkelanjutan, Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa semua program dan kegiatan pemerintah daerah benar-benar memerhatikan perspektif gender. Tidak hanya dari segi kepatuhan regulasi, tetapi juga dari segi kualitas pelayanan publik yang merata bagi seluruh warga tanpa diskriminasi gender. Upaya ini pada akhirnya akan memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sekaligus mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.</p>	
<b>RENCANA TINDAK</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</b>

	<b>Tujuan Sub kegiatan Responsif gender</b>	<b>Memastikan kinerja pemerintah daerah berkeadilan dan setara bagi seluruh gender.”</b>
	<b>Rencana Tindak</b>	9. Penyusunan PKPT terkait Monev PUG 10. Penetapan PKPT 11. Rapat koordinasi internal membahas penugasan Monev PUG 12. Penyusunan Surat Tugas 13. Pelaksanaan Monev PUG 14. Penyusunan LHM PUG 15. Pendistribusian LHM ke OPD terkait 16. Monev
<b>ALOKASI SUMBER DAYA</b>	<b>Anggaran</b>	Rp 143.000.000
	<b>SDM</b>	1. Pelaksanaan Kegiatan Monev 6 orang 2. Monitoring Tindak lanjut 8 orang
	<b>Peralatan dan Mesin</b>	1. Modul 2. Laptop 3. Printer 4. LCD 5. Layar
Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Target Kinerja: 39	
Immediate Outcome/Kegiatan	Indikator Kinerja: Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa Target Kinerja: 154	
Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: Persentase Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan Target Kinerja : 100%	
Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: Nilai Kapabilitas APiP Target Kinerja: 3,060	
Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Nilai Maturitas SPIP Target Kinerja: 3.090	

Purbalingga, 16 Juli 2025  
 INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA



**TO SUSANTO.AP., M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740706 199311 1 001